

**PENGUATAN GOOD GOVERNANCE
MELALUI PENGADAAN BARANG DAN
JASA**

**STUDI KASUS DPRD KOTA TANGERANG
SELATAN**

**Medina Lutfiani Pranoto, Dr. Dra.
Kushandajani, M.S., Dr. Drs. Teguh Yuwono,
M.Pol. Admin.**

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang,
Kotak Pos 1269.

Telepon (024) 746507, Faksimile (024) 7465405

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Penguatan Good Governance Melalui Pengadaan Barang dan Jasa yang dapat mempermudah pelayanan bertransaksi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berbasis elektronik. Hal ini juga dapat membantu mencegah terjadinya praktik korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa publik. Pada Peraturan Presiden pada Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah E-Katalog pada dasarnya merupakan sebuah tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo dalam Inpres, dengan menindih percepatan membuka sistem E-Procurement dan penerapan E-Purchasing yang berbasis E-Katalog.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah dalam penggunaan E-Katalog tersebut sudah efektif untuk mendorong transparansi barang dan jasa (Organisasi, Interpretasi, Aplikasi) dan manfaat yang

diberikan dalam penggunaan E- Katalog tersebut. Penelitian ini menggunakan indikator (Organisasi, Interpretasi dan Value) dalam kebijakan Charles O. Jones pada penerapan kebijakan yang paling penting. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan E-Katalog di DPRD Kota Tangerang Selatan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada proses pengadaan barang dan jasa.

E- Katalog memberikan akses yang lebih terbuka terhadap informasi terkait produk, harga, dan penyedia jasa, sehingga memungkinkan adanya pengawasan yang lebih baik terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Implementasi ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan good governance, Selain itu, penggunaan E-Katalog juga membawa efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. kendala yang masih dihadapi dalam implementasi E- Katalog tersebut ialah aspek teknis dan operasional, seperti kurangnya pemahaman teknis di kalangan staf DPRD dan pelatihan yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengakses dan menggunakan sistem secara optimal.

Kata Kunci; E-Katalog, E-Procurement, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi

ABSTRACT

This study discusses the strengthening of Good Governance through the procurement of goods and services, which can facilitate transactional services in government procurement based on electronic systems. It can also help prevent corruption and nepotism in public procurement. Presidential Regulation Number 16 of 2018 on Government Goods or Services Procurement through the E-Catalog essentially serves as a follow-up to President Joko Widodo's directives in the Presidential Instruction, emphasizing the

acceleration of the implementation of the E-Procurement system and the application of E-Purchasing based on the E-Catalog.

This research aims to analyze whether the use of the E-Catalog is effective in promoting transparency in goods and services (Organization, Interpretation, Application) and the benefits provided through its usage. The study uses indicators (Organization, Interpretation, and Value) from Charles O. Jones's policy framework for policy implementation. This research employs a qualitative approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the implementation of the E-Catalog in the Regional People's Representative Council (DPRD) of South Tangerang City has a significant role in enhancing transparency and accountability in the procurement process of goods and services.

The E-Catalog provides more open access to information related to products, prices, and service providers, enabling better supervision of each transaction conducted. This implementation serves as an essential pillar in achieving good governance. Furthermore, the use of the E-Catalog also brings efficiency in goods and services procurement. However, there are still challenges in the implementation of the E-Catalog, including technical and operational aspects, such as the lack of technical understanding among DPRD staff and insufficient training. These factors cause difficulties in accessing and utilizing the system optimally.

Keywords: E-Catalog, E-Procurement, Organization, Interpretation, Application.

PENDAHULUAN

Good Governace adalah paradigma kepada negara berkembang, dari banyaknya negara berkembang tersebut Indonesia lah salah satunya. *Good Governace* adalah paradigma kepada negara berkembang, dari banyaknya negara berkembang tersebut Indonesia lah salah satunya. Pada artinya goverance adalah tata cara pemerintah untuk dapat mengatur sumber daya yang ada dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan berada dilingkup masyarakat, dalam menuju *good governance* tersebut, pemerintah dan masyarakat menjadi aktor awal untuk dapat terwujudnya *good governance* di Indonesia, Sedangkan, pada otonomi sendiri merupakan langkah awal untuk terlaksananya mendukung *good governance*.

Pada era teknologi digitalisasi ini, guna dapat mengikuti perkembangan zaman yang lebih spesifik dalam sektor pengadaan barang atau jasa pemerintah, yang lebih efisien, transparansi yang tepat maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang atau Jasa. Hadirnya kebijakan mengenai barang/jasa dengan melalui mekanisme e-purchasing sistem e-katalog tersebut merupakan kebijakan baru yang mempunyai tujuan guna dapat membantu alur pengadaan pemerintah di

era Internet of Things (IoT) agar dapat sesuai dengan mengikuti kemajuan jaman.

Dalam pelaksanaannya pengadaan barang dan jasa dengan melalui e-katalog ini lebih lagi diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden yang terdapat pada Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah. Oleh sebab itu e-katalog tersebut sangat diperlukan sebagai kriteria untuk pemenuhan kebutuhan nasional yang dimana pengadaan barang dan jasa ini dibiayai oleh lembaga kementerian ataupun perangkat daerah yang semuanya telah teranggar oleh APBN/APBD.

Pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan suatu aktivitas akan dapat mencapai barang dan jasa yang bertujuan dalam mencakup kebutuhan kementrian, perangkat daerah, lembaga, dan instansi pemerintah. Pelaksanaan pemberian barang atau jasa ini memiliki prinsip dalam prosesnya yang menjadikan acuan dalam pelaksanaannya. Seiring dengan berjalannya waktu dalam mengakses terdapat permasalahan yang terjadi terhadap e-katalog yang meliputi ketidak lengkapan produk, kesulitan navigasi dalam situs, masalah pada teknis seperti lambatnya loading halaman, dan keamanan data pelanggan yang masih kurang terjamin, pada latar belakang ini menuju pada studi kasus yang terjadi di Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan.

Seperti diketahui bahwa pengadaan pengelolaan barang dan jasa ini memiliki peran dalam penguatan good governance. Hadirnya e-

Katalog dapat membantu mendorong transparansi dalam pembelian publik dengan menyediakan akses terbuka kepada informasi produk dan harga, instansi pemerintah juga dapat memastikan bahwa proses pembelian ini dilakukan secara transparansi dan adil. Dengan hal ini dapat membantu mencegah terjadinya praktik korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa publik. Dalam dunia pemerintahan hadirnya sebuah teknologi menjadi kemajuan yang sangat maksimal untuk dapat meningkatkan performa pekerjaan, apabila dilihat dari sudut pandang pemerintahan hal ini sangat membantu. Dilihat dalam sistem procurement, sistem ini dirancang untuk dapat memastikan pengadaan ini dapat dilakukan dengan efisien.

Rumusan Masalah

Bagaimana manfaat dari adanya e-katalog dalam sistem implementasi yang diberikan pada barang dan jasa secara online untuk mewujudkan good governance dan apakah e-katalog tersebut sudah mampu secara optimal untuk dapat mendorong transparansi barang dan jasa di DPRD Kota Tangerang Selatan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang diberikan dari adanya sistem implementasi serta dapat mendorong transparansi barang dan jasa.

Kerangka Teori

E-Katalog

E-katalog merupakan sistem informasi elektronik yang termuat dari jenis, daftar, harga, spesifikasi teknis. Pada penerapannya e-katalog memperhatikan prinsip-prinsip yang sebagaimana sudah di jelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. E-katalog dalam implementasi merupakan sistem pengadaan online, dalam e-katalog dalam pembuatan e-katalog ini memang terdapat rintangan yang diciptakan oleh perangkat desa atau perangkat lunak yang berbeda dan beragam masing-masing kemampuannya untuk dapat berinteraksi dengan IT.

E-katalog ini sebagai sarana dari proses pengadaan untuk para pelaku pengadaan barang jasa yang nantinya akan menjadimin sistem transparansi yang menjadi lebih muda dan efisien terutama pada lembaga pemerintah. Hadirnya e-katalog dapat diharapkan akan menciptakan iklim persaingan yang sehat, meningkatkan kualitas produk, dan mampu mengembangkan prestasi kerja.

Lokal Good Governance

Good Governance adalah suatu acuan utama dari adanya praktik pemerintahan, pada praktik tersebut

pemerintah telah memiliki komitmen yang demokratis. Pada definisinya *good governance* sangat penting, dengan kepentingan tersebut sebagaimana telah diusung oleh PPB mengenai pembangunan berkelanjutan (*sustaibale development gold*) itu sangat penting untuk mengedepankan dan mengembangkan pembangunan manusia.

Dalam paradigma *good governance* pada praktiknya mengedepankan adanya beberapa prinsip, prinsip tersebut yang dimaksud adalah transparansi, akuntabilitas, partisipatif, pengawasan, dan kesetaraan, prinsip tersebut dijelaskan oleh UNDP (1997: Bappenas 2008; dan Eureka Union 2013).

E-Procurement

E-procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat memanfaatkan teknologi sebagai komunikasi. Hal ini bertujuan untuk dapat mengelola keseluruhan proses dalam pengadaan barang dan jasa. E-procurement menurut Sutedi (2012:254) adalah sistem lelang pada pengadaan barang atau jasa pemerintah yang memanfaatkan teknologi baik pada informasi dan komunikasi berbasis internet. Hal ini bertujuan agar

dapat berjalan secara terbuka, akuntabel, efektif serta efisien. Pada E-procurement ini memiliki dua elemen penting, yang dapat dilakukan dengan dua cara *e-Tendering* dan *e-Purchasing*.

Implementasi Kebijakan Charles O. Jones

Teori Charles O. Jones ini menjadikan analisis dengan melihat permasalahan yang terjadi, Charles O, Jones (1995:166), mengemukakan perihal penerapan kebijakan yang merupakan serangkaian dari kegiatan untuk melangsungkan program yang telah dimaksud dengan adanya tujuan. Dalam kebijakan Charles O. Jones pada penerapan kebijakannya memiliki tiga penerapan kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang penting, aktivitas utama tersebut adalah *organization, interpretation, and application*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada penelitian kualitatif mengarah atas fenomena atau indikasi yang memiliki sifat lumrah. Selanjutnya dalam penelitian kualitatif ini, memakai teknik uraian mendalam (*in-depth analysis*), yaitu dengan mendalami permasalahan sebagai khusus sebab

mempunyai karakter dari satu permasalahan dapat tidak samadengan karakter dari adanya permasalahan lainnya.

Jenis penelitian kualitatif ini, merupakan pendekatan penelitian pada ilmu sosial yang mengaplikasikan paradigma alamiah, dengan berdasar pada teori fenomenologis untuk selanjutnya akan meneliti mengenai masalah sosial pada suatu wilayah baik dari segi latar dan sudut pandang obyek yang diteliti secara holistic. Penelitian kualitatif bertujuan untuk dapat menggali serta dapat menemukan informasi mengenai suatu topik atau permasalahan yang akan diteliti. Pada informasi yang dimaksud yaitu Peran E-Katalog Dalam Mendorong Transparansi Transaksi Barang dan Jasa DPRD Kota Tangerang Selatan.

.Dalam penelitian ini mencari dan mengumpulkan data sebagai sumber data yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, proses penelitian yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder. Pada data primer diperoleh dengan cara langsung dengan teknik menggunakan teknik wawancara sedangkan pada data sekunder didapatkan melalui artikel, jurnal, skripsi, tesis, sehingga nantinya akan

digunakan sebagai data pelengkap apabila terdapat kekurangan.

Pada upaya penelitian, untuk mendapatkan data menggunakan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi agar data yang diambil sesuai dengan tujuan peneliti nantinya dapat menganalisis serta peneliti juga harus menentukan dan meimilah data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGUATAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dengan seiring pada perkembangan perekonomian di Indonesia pemerintah membutuhkan tata kelola yang mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas untuk terciptanya good governance. Pengadaan barang dan jasa merupakan aktivitas penting untuk mewujudkan pembangunan serta meningkatkan nilai transparansi, dalam prosesnya aplikasi e-purchasing menggunakan e-katalog ini menjadi sistem sarana informasi yang dapat memuat daftar, spesifikasi dan jenis pada suatu barang yang diberikan dari penyedia atau pemerintah. E-Katalog adalah sebuah platform digital yang menyediakan informasi lengkap mengenai produk dan jasa yang

tersedia, termasuk harga, spesifikasi, dan penyedia jasa.

E- katalog merupakan konsep yang berkaitan dengan e-procurement mereka sama-sama mendukung satu sama lain. Hubungan e-Procurement dengan e-Katalog adalah E-katalog ini sebagai alat pendukung e-Procurement, e-Katalog dapat menyederhanakan Proses Pengadaan serta dapat mendukung pengadaan secara elektronik yang terintegrasi. Hubungan kedua ini sangat erat dimana e-Procurement merupakan sistem keseluruhan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik, sedangkan pada e-Katalog sendiri merupakan bagian yang didalamnya berperan sebagai media untuk dapat memfasilitasi pembelian barang atau jasa yang sudah berperan sebagai media untuk memfasilitasi pembelian barang atau jasa yang sudah terstandarisasi.

Melalui E-Katalog, DPRD dan masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai barang dan jasa yang akan dibeli oleh pemerintah daerah. Penggunaan E-Katalog memungkinkan DPRD untuk memantau harga dan kualitas barang serta jasa yang ditawarkan oleh berbagai penyedia. Hal ini memungkinkan DPRD untuk membandingkan harga dan kualitas produk dari berbagai sumber,

sehingga dapat memastikan bahwa keputusan pembelian didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan transparan.

Penerapan E-Katalog dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh DPRD Kota Tangerang Selatan juga sejalan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). E-Katalog memberikan akses terbuka kepada informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan prinsip transparansi dalam GCG.

Dalam transaksi barang dan jasa melalui E-Katalog ini, merupakan bagian yang penting dalam mengelola keuangan dengan sesuai pada pengeluaran kebutuhan negara. Dalam perwujudannya tersebut terdapat pelaksanaan proses barang atau jasa pemerintah secara elektronik yaitu dengan pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan sebuah metode teknologi transaksi elektronik sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pengadaan barang atau jasa pemerintah ini dapat menjamin terjadinya efektifitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dalam pembelajaran negara.

E-Katalog menawarkan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan transparansi sistem pengadaan barang dan jasa, mendukung prinsip good governance.

Dengan platform ini, informasi mengenai barang dan jasa yang tersedia dapat diakses secara online oleh publik. Ini memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam proses pengadaan karena semua data terkait dapat diperiksa oleh masyarakat, pengawas internal, dan pihak berkepentingan lainnya. Proses ini mengurangi potensi korupsi dan penyimpangan karena informasi yang terbuka meminimalkan kemungkinan praktik curang. Selain itu, sistem ini meningkatkan efisiensi dengan menyederhanakan pencarian, perbandingan, dan pemilihan barang serta jasa. Namun, meskipun E-Katalog memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi di DPRD Kota Tangerang Selatan, penerapannya belum sepenuhnya optimal.

Manfaat E-Katalog Dalam Sistem Implementasi

Sistem implementasi mengacu pada proses penerapan atau eksekusi suatu rencana, strategi, atau sistem yang telah dirancang ke dalam praktik nyata. Hal ini melibatkan berbagai langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik dalam lingkungan yang dimaksud. E-katalog ini merupakan dua konsep dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang dimana

sama-sama saling berkaitan dengan e-procurement serta mendukung satu sama lain.

Salah satu manfaat utama dari E-Katalog adalah peningkatan akses informasi. Sebelum adanya E-Katalog, proses pengadaan sering kali dilakukan secara manual, yang dapat mengakibatkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Dengan E-Katalog, semua informasi mengenai barang dan jasa tersedia secara online dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hal ini mempermudah instansi pemerintah untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cepat dan akurat. Selain itu, masyarakat umum juga dapat mengakses informasi ini, sehingga tercipta kontrol sosial yang efektif terhadap proses pengadaan. Kemudahan dalam membandingkan harga dan kualitas adalah manfaat lain dari E-Katalog.

Proses ini dilakukan secara transparan, sehingga mengurangi risiko adanya mark-up harga atau permainan harga di bawah meja yang sering terjadi dalam sistem pengadaan konvensional. Selain itu, E-Katalog mempercepat proses pengadaan. Dengan E-Katalog, proses ini menjadi lebih efisien karena semua prosedur dapat dilakukan secara online, mulai dari pencarian barang atau jasa, pemilihan penyedia, hingga

pengajuan dan persetujuan pembelian. Hal ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi biaya administrasi yang diperlukan. E-Katalog juga meningkatkan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Karena semua transaksi tercatat secara digital, mudah untuk melakukan audit dan penelusuran kembali terhadap setiap langkah dalam proses pengadaan.

Dalam konteks yang lebih luas, keberhasilan implementasi E-Katalog juga dapat mendorong transformasi digital dalam sektor pemerintahan. Ini akan membuka peluang untuk mengadopsi inovasi teknologi lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem E-Katalog, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia akan semakin meningkat, memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

Penggunaan E-Katalog Untuk Mendorong Tranparansi Barang dan Jasa Di DPRD Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan pada penelitian, terdapat indikasi mengenai sistem E-Katalog sebelumnya masih belum berjalan optimal, dalam mendorong transparansi barang dan jasa di DPRD Kota Tangerang Selatan.

Terdapat kekurangan dalam infrastruktur teknis atau masalah dalam desain antarmuka pengguna yang memerlukan perhatian untuk memperbaiki pengalaman pengguna dan memastikan sistem dapat diakses dengan mudah. Selanjutnya, ketergantungan pada prosedur yang ada juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas E-Katalog. Ketergantungan pada prosedur yang tidak terintegrasi sepenuhnya dengan sistem dapat mengurangi efisiensi pengadaan barang dan jasa. Sistem E-Katalog seharusnya dapat berintegrasi dengan prosedur yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan kelancaran proses.

Terakhir, meskipun yang lainnya dalam wawancara tersebut menjelaskan strategi yang baik dalam hal pengembangan karier dan pelayanan publik, penting untuk diingat bahwa keberhasilan E-Katalog juga bergantung pada kemampuannya untuk mendukung aspek operasional seperti pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan hasil pengamatan wawancara yang didasari pada telaah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones beserta dengan ketiga aktifitas utama sebagai berikut:

1. Organisasi

Organisasi adalah fondasi utama yang mendukung pelaksanaan fungsi manajerial dan operasional dalam sebuah lembaga atau perusahaan. Struktur dan sistem organisasi yang baik memungkinkan setiap bagian berfungsi dengan optimal, memastikan semua proses berjalan sesuai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Pelatihan dalam penggunaan e-Katalog ini biasanya diselenggarakan oleh Lembaga Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) untuk dapat memastikan para pelaku pengadaan baik pada instansi maupun penyedia barang tersebut dapat memahami penggunaan e-Katalog.

E-katalog apabila dilihat dari segi Organisasi, sistem ini dikembangkan untuk dapat mendukung proses pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah dengan melalui penggunaan teknologi informasi. Dalam implementasinya e-Katalog tersebut membutuhkan dukungan dari beberapa unit serta pelaku di dalam organisasi pemerintah. Penggunaan e-Katalog ini mengubah cara kerja dari proses pengadaan tradisional yang kompleks menjadi lebih terstruktur dan efisiensi. Berdasarkan penerapan ini organisasi memberikan dampak terhadap penyedia, implementasi e-Katalog dapat mempengaruhi cara organisasi berinteraksi baik pada penyedia atau jasa. Dampak yang

diberikan dari adanya implementasi e-Katalog ini yaitu adanya persaingan yang lebih terbuka, hubungan yang lebih formal dan manajemen kinerja penyedia dimana dengan sistem ini pemerintah dapat memantau kinerja penyedia secara berkala.

Melalui wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa struktur dan sistem organisasi memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap staf. Pelatihan yang memadai, prosedur yang ketat, program pemberdayaan masyarakat, strategi pengembangan karier, pengelolaan keuangan yang transparan, dan pelayanan publik yang berkualitas adalah beberapa aspek kunci yang diungkapkan oleh para informan.

Organisasi yang terstruktur dengan baik tidak hanya memastikan efisiensi operasional, tetapi juga memberikan dukungan dan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal. Dengan begitu semakin meningkatnya peranan dan fungsi pengadaan dalam organisasi, maka pada fungsi pengadaan mengemban berbagai banyak tugas dalam organisasi untuk dapat menyediakan kebutuhan yang memiliki *value for money*.

2. Interpretasi

Interpretasi adalah proses penting dalam memahami informasi dan menerapkannya dalam konteks yang lebih luas. Setiap informan memberikan penjelasan mendalam mengenai bagaimana mereka menginterpretasikan situasi dan kebijakan dalam pekerjaan mereka serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi kinerja sehari-hari mereka.

Kualitas pelayanan yang baik sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Menekankan bahwa dengan memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan efisien, masyarakat akan merasa lebih dihargai dan puas. Memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan positif dengan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan reputasi dan kepercayaan terhadap lembaga. Dari segi interpretasi, e-Katalog dapat dilihat dari segi sebuah konsep yang dapat melampaui perannya sebagai sistem digital untuk proses pengadaan barang dan jasa. Interpretasi juga mencakup pemahaman dari aspek filosofi, kebijakan, tujuan strategi serta makna yang lebih luas dalam konteks transparansi dan reformasi birokrasi.

Apabila dilihat dari sudut pandang interpretasi filosofis dalam perwujudan

prinsip good governance ini e-Katalog tidak hanya dipandang sebagai alat untuk dapat melakukan pembelian barang atau jasa, tetapi juga sebagai perwujudan dari prinsip tata kelola pemerintah yang baik, dimana dalam konteks ini e-Katalog merefleksikan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas serta kapasitas hukum. Pada sudut pandang interpretasi Ekonomi sebagai pasar elektronik pemerintah interpretasi tersebut mencakup untuk memaksimalkan efisiensi pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok dan mendorong pertumbuhan penyedia lokal.

Interpretasi informasi dan kebijakan yang tepat dilingkup pemerintahan ini sangat penting untuk kinerja organisasi. Melalui pemahaman mendalam dan penerapan yang efektif, setiap bagian dalam organisasi dapat berfungsi dengan optimal. Pelatihan yang memadai, disiplin dalam protokol, program pemberdayaan masyarakat, pengembangan karier, penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik yang berkualitas adalah beberapa faktor kunci yang mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan. Interpretasi yang baik dari kebijakan dan situasi yang ada membantu staf untuk mengatasi kendala, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan organisasi. Sistem ini tidak hanya sekedar platform digital saja namun dapat

mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan tata kelola pengadaan yang lebih baik.

3. Aplikasi

Aplikasi adalah tahap di mana informasi dan interpretasi yang didapatkan diterapkan dalam praktik nyata. Setiap informan memberikan contoh bagaimana mereka menerapkan pengetahuan dan kebijakan dalam pekerjaan sehari-hari untuk mencapai hasil yang diinginkan. Wawancara yang dilakukan menunjukkan bagaimana pelatihan, prosedur, dan kebijakan diterapkan dalam berbagai konteks operasional di organisasi mereka.

Pada pelatihan e-Katalog ini sangat singkat diterapkan dalam praktek sehari-hari. Meskipun pelatihan ini membantu staf untuk memahami dasar-dasar penggunaan E-Katalog, durasi yang singkat mengakibatkan pemahaman yang kurang mendalam, menyebabkan berbagai kesulitan teknis saat mengakses sistem. Namun dengan seiringnya berjalan waktu staff atau pegawai pemerintahan dituntut untuk mampu dalam menjalankan tugasnya. Dari segi aplikasi, e-Katalog ini dapat diartikan sebagai platform berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk memfasilitasi pengadaan barang dan

jasa secara elektronik dilingkungan pemerintahan. E-katalog merupakan sarana marketplace resmi yang dikembangkan oleh Lemabaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintag (LKPP) yang bertujuan untuk mempermudah pencarian, pemilihan dan pembelian barang atau jasa secara lebih transparan, efisien dan akuntabel.

Berdasarkan fungsinya untuk dapat mendukung proses pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintah seperti memfasilitasi pemilihan barang atau jasa. Dengan memberikan pendampingan dan evaluasi berkelanjutan, program pelatihan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan, membantu peserta untuk terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada hasil penelitian ini terdapat program mentoring membantu pegawai baru untuk beradaptasi dan mengembangkan keterampilan mereka dengan cepat. Program mentoring ini memungkinkan pegawai baru untuk belajar dari pengalaman senior mereka, mempercepat proses adaptasi dan pengembangan keterampilan.

Manfaat yang diberikan dari e-Katalog tersebut pada elemen aplikasi ini juga sebagai pengadaan yang lebih cepat dan efisien, kemudahan akses informasi, akuntabilitas

yang lebih tinggi serta pengelolaan anggaran yang lebih membaik. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi tersendiri walaupun pada aplikasi tersebut memiliki banyak manfaat, implementasi tersebut juga dihadapkan pada beberapa rintangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi tidak semua instansi pemerintah memiliki akses internet yang stabil ini bisa menjadi kendala dalam mengakses aplikasi e-Katalog secara real-time, adaptasi pengguna dimana beberapa pegawai pemerintah yang masih menggunakan sistem manual mungkin masih sulit dalam menggunakan aplikasi berbasis digital jadi masih memerlukan pelatihan yang intensif, dan keamanan data meski sistem ini sudah dilengkapi dengan mekanisme keamanan data, namun masih terdapat ancaman dari siber yang selalu ada sehingga pada perlindungan berkelanjutan harus terus diterapkan untuk keamanan data instansi.

Aplikasi informasi dan interpretasi yang tepat dalam praktek nyata sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pelatihan yang memadai, prosedur yang terstruktur, dukungan lanjutan, program mentoring, penggunaan teknologi, dan inovasi dalam pelayanan adalah beberapa contoh bagaimana pengetahuan dan kebijakan diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Implementasi yang baik tidak hanya

meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi karyawan dan masyarakat yang dilayani oleh organisasi

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan *good governance*, di mana setiap tahapan proses pengadaan dapat dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, penggunaan E-Katalog juga membawa efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa. Proses pemilihan barang atau jasa menjadi lebih cepat dan tepat sasaran karena sistem ini memungkinkan perbandingan yang lebih mudah antara berbagai pilihan yang tersedia. Dengan demikian, keputusan pembelian dapat dilakukan secara lebih objektif, berdasarkan pertimbangan yang rasional dan data yang akurat. Efisiensi ini juga mendukung akuntabilitas, karena semua transaksi tercatat dengan baik dan dapat ditelusuri kembali jika diperlukan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan E-Katalog di DPRD Kota Tangerang Selatan memiliki peran yang

signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada proses pengadaan barang dan jasa. E-Katalog memberikan akses yang lebih terbuka terhadap informasi terkait produk, harga, dan penyedia jasa, sehingga memungkinkan adanya pengawasan yang lebih baik terhadap setiap transaksi yang dilakukan.

Terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi dalam implementasi E-Katalog. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan aspek teknis dan operasional, Di sisi lain, E-Katalog juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tangerang Selatan. Melalui E-Katalog, produk-produk lokal lebih mudah diakses oleh pemerintah, sehingga mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkuat perekonomian lokal. Dengan demikian, E-Katalog tidak hanya berfungsi sebagai alat efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, ada beberapa saran yang dapat diusulkan guna meningkatkan efektivitas

penerapan E-Katalog di DPRD Kota Tangerang Selatan. diperlukan peningkatan kualitas dan durasi pelatihan bagi staf yang terkait dengan penggunaan E-Katalog. Pelatihan yang lebih mendalam dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa semua staf memiliki pemahaman yang cukup tentang sistem ini, sehingga mereka dapat mengatasi kendala teknis yang ada dan memanfaatkan E-Katalog secara optimal. Selain itu, pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung kelancaran operasional E-Katalog juga sangat diperlukan. Masalah-masalah teknis seperti kesulitan navigasi dan kecepatan akses yang lambat harus segera diatasi melalui peningkatan kualitas jaringan internet dan pemeliharaan situs secara berkala. Dengan infrastruktur yang lebih baik, diharapkan E-Katalog dapat berfungsi lebih efektif dan efisien.

Pengawasan dan audit juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa proses

pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi E-Katalog sangat penting untuk memastikan sistem ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal. Dengan melakukan evaluasi secara rutin, DPRD dapat mengidentifikasi kelemahan yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja E-Katalog dalam mendukung *good governance* di Kota Tangerang Selatan.

Daftar Pustaka

Adriansyah, Alexandri, M. B., & Halimah, M. (2021, April). Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. 13-22

Aenal, F. A., & Saragih, P. D. (2022). Menakar Kinerja DPRD Kabupaten Merauke. *Musamus Journal Of Public Administration, Vol : IV No. 2 Tahun 2022*, 165-175.

Amalia, N. F. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam

Pengawasan Keuangan Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 295-304.

Ariesta, D. (2021). EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-CATALOGUE DI KECAMATAN KEBAYORAN LAMA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN (Effectiveness of Procurement of Goods and Services Through E-Catalogue in Kebayoran Lama District, Jakarta Selatan Administration City. *Vol. 1 No. 2*.

Azhari, D., & Sudiarti, S. (2022). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Emak Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3 No. 2, April 2022, 634-638.

Darmawan, S. A. (2022, Oktober). Penetapan HPS E-Purchasing: Tinjauan Akuntabilitas dan Mekanisme Pasar. *Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa (JPBJ)*, Vo. 1 No. 2, 130-138.

Diani, F., & Lubis, F. A. (2022). Analisis Implementasi E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM Di Kota Medan Dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.

Hilmy, Z. (2020). Analisa Deskriptif Tentang Sistem Tender Pengadaan Kapal LPSE (E-Katalog) Dengan Sistem Konvensional Berdasarkan Legal Formal Di Indonesia. *Jurnal Jalasena*, Vol. 1 No.2 .

Indartini, M., Wibisono, M., & Widjisen, A. (2019). *Peran dan Fungsi DPRD Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Daerah*. Sukaharjo: Penerbit Taujih.

Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3 No. 1.

Khamim, M. (2021). *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.

Kusuma, F. A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 10, Nomor 9 September 2021, 1-17.

Mandey, M. (2016). Implementasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Dalam Rangka "Good Governance". *Vol. IV/No. 2/ Feb/ 2016*, 178-188.

Mariam, S., & Ramli, A. H. (2022, Juli). Pengenalan Digital Marketing E-Katalog bagi UMKM Binaan Jakprenur. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 5. No. 1, 74-83.

Nafi'ah, B. A. (2022, September). Analisis Stakeholder Kebijakan E-Katalog Dalam Membranding Produk Lokal.

Journal of Public Administration,
Vol. 1 No. 2, 15-21.

Nasution, A. S., & Hurhayati. (2022). Analisis Penggunaan E-Catalog Sebagai Penunjang Aktivitas UMKM Di Kantor Walikota Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (Jikem)*, 323-239.

Nurhayati. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Trias Politika*, Vol 1. No. 2 Oktober 2017, 36-53.

Pangkey, d. (2022). Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (Studi Kasus: DPRD Kabupaten Minahasa Selatan). Vol. 1, No. 2, 2022.

Pangkey, Y., Liando, M. D., & Sampe, S. (2022). Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (Studi Kasus : Dprd Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Governance*, 10-12.

Rahmawati, R. A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 5, No. 2, Mei 2016, 123-126.

Suanto. (2017). PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 9 TAHUN 20151 (Studi pada . *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* , Vol. 4 No. 3 Desember 2017, 264-266.

Sugianto, B. (2017). Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014. 343-358.

Sudrajat, A. R. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Publik: Bagaimana Pengaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah Di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Education and Development*, Vol. 9 No. 4 Edisi Nopember 2021, 395-401.

Sangkala. (2022). *Responsivitas dan Akuntabilitas Organisasi Publik Teori dan Implementasi*. Makasar: Unhas Press.

Samsu, A. d. (2023, Maret). Pengaruh Efisiensi Pemesanan, Kemudahan Pemasaran, dan Penetapan Harga Pada Penggunaan E-Katalog Terhadap Perkembangan UMKM Di Kabupaten Magetan. *Jurnal Ilmu -Ilmu Akuntansi Merdeka*, Vol, 4 Nomor 1, 33-45

